

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Baringbing Simpul, RE. 2001. *Mewujudkan Supremasi Hukum*. Jakarta: Pusat Kegiatan Reformasi.
- Sutadi, Aryanto, *et al.* 2013. *DISKRESI KEPOLISIAN; Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan*. Cetakan Kedua. Jakarta. Komisi Kepolisian Nasional.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, Seorjono. 2006. *Hukum Acara Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sadjijono. 2006. *Hukum kepolisian*, cetakan pertama. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Rahardi, Pudi. 2014. *Hukum Kepolisian, kemandirian, profesionalisme dan reformasi POLRI*, cetakan pertama. Surabaya: Laksbang Grafika.
- Lukman, Marcus. 1996. *Eksistensi Peraturan Kebijakan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional, Disertasi*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Kelsen, Hans. 2011. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media.
- Nasroen, M. 1996. *Asal Mula Negara*. Jakarta: Aksara Batu.
- Rasjidi, Lili. 2011. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Jakarta: Citra Aditya.
- Simorangkir, JCT dkk. 2008. *Kamus Hukum*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Huda, Ni'matul. 2005. *HUKUM TATA NEGARA INDONESIA*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Saimima, Ika Dewi Sartika *et al.* 2020. *PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*. Bekasi: FH-UBHARA Press.

Diantha, I Made Pasek. 2017. *METODOLOGI PENELITIAN HUKUM NORMATIF DALAM JUSTIFIKASI TEORI HUKUM*. Cetakan ke-2. Jakarta: Prenada Media Group.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 Tahun 2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Perkap Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Perkap Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa.

Perkap No. 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara.

Perkap Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Pergub DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.